

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Good Government Governance* (GGG) dalam pengelolaan BPHTB tahun pajak 2017, memperoleh hasil bahwa secara keseluruhan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya menerapkan prinsip GGG. Adapun penjelasan mengenai penerapan prinsip GGG sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengelolaan BPHTB belum seluruhnya dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena berbagai kendala yang dihadapi. Kekurangan pegawai diBKAD Bantul dan banyaknya WP yang mengajukan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Pelayanan yang dilakukan oleh pegawai BKAD Bantul telah dilakukan dengan efektif dan efisien. Hasil penerapan prinsip tersebut adalah tercapainya perolehan BPHTB yang melebihi target. Upaya penerapan prinsip efektif dan efisien dilakukan pelayanan yang sesuai SOP. Selain itu pelayanan dapat diselesaikan dalam sehari dengan mendatangi setiap desa di Kabupaten Bantul (SISARI).
3. Prinsip keadilan sudah diterapkan dalam pengelolaan BPHTB di BKAD Bantul. Pelayanan terhadap WP tidak membedakan suku, ras, dan jabatan. Perlakuan pelayanan dilakukan dengan ramah dan sabar dalam menjelaskan prosedur maupun syarat administrasi. Perwujudan prinsip

kepastian hukum didukung oleh pengawasan intern, kesadaran terhadap tanggung jawab, dan menjalankan SOP yang ada.

4. Perwujudan prinsip transparansi dalam pengelolaan BPHTB sudah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Bantul. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan BPHTB, laporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan melalui media *Web* BKAD Bantul, surat kabar, radio, dan media lainnya. Hal itu dapat terwujud karena adanya pihak yang bertanggung jawab, yaitu Kominfo yang mengkoordinasi setiap bidang di BKAD Bantul.
5. Prinsip akuntabilitas sudah diterapkan oleh BKAD Bantul dalam mengelola BPHTB. Pertanggungjawaban dalam bentuk rekapitulasi BPHTB diserahkan kepada Kasubid Bidang Pelayanan dan Pendaftaran untuk diperiksa. Selain itu, pertanggungjawaban mengenai hasil pencapaian Pajak Daerah selalu disampaikan kepada Bupati Bantul setiap bulannya dan rapat *prognosis* selalu dilakukan setiap semester untuk membahas hasil pencapaian dan kendala yang dihadapi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat disampaikan penulis yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Obyek yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak, agar dapat digunakan dalam perbandingan penerapan prinsip *Good Government Governance* di BKAD Bantul.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan untuk menambah pegawai pajak, sehingga pengelolaan pajak di BKAD Bantul dapat selesai dengan tepat waktu.
3. Penindakan terhadap Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan Obyek Pajak perlu diberi hukuman, agar memberikan efek jera.